

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun anggaran 2021, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMENKP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Target berdasarkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan target pencapaian kinerja tahun anggaran 2021 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dihitung dengan metode pengukuran tertentu.
- KETIGA : Penanggung jawab untuk memenuhi target pencapaian kinerja tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu Pejabat Eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

No	Pejabat	Paraf
1.	Sesditjen PT	
2.	Dir. PSDI	
3.	Dir. PDK	
4.	Dir. KAPI	
5.	Dir. KP	
6.	Korbid HOK	
7.	Korbid Program	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
TAHUN ANGGARAN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN STRATEGIS PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program		Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.		Catatan Biro Perencanaan: <del>format tabel indikator kinerja utama</del> tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan		
1	Kesejahteraan nelayan meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	<del>102</del>	Dihitung dari Indeks Harga (It) yang diterima Nelayan dibagi dengan Indeks harga (Ib) yang dibayar Nelayan dikali 100	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
2	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan	2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	<del>≤67</del>	Dihitung dari jumlah volume produksi pada saat bulan berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Kepmen KP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2017)	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

SASARAN STRATEGIS PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program		Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.		Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan		
3	Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	3	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (kumulatif) (WPP)	5	Dihitung dari jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Perikanan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI melalui:  (1) identifikasi kebijakan pengelolaan perikanan prioritas yang di kelola berkelanjutan di WPPNRI	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
			<p>yang menjadi model percontohan;</p> <p>(2) analisa data dan informasi pengelolaan perikanan di WPPNRI yang menjadi model percontohan;</p> <p>(3) Penyusunan kebijakan dan roadmap pengelolaan perikanan prioritas yang di kelola berkelanjutan di WPPNRI yang menjadi model percontohan</p>	

SASARAN STRATEGIS PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program		Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.		Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan		
4	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	4	Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	<b>8,08</b>	Dihitung dari jumlah volume produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
5	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan	<b>4</b>	Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner	1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan 2. Direktur Pelabuhan Perikanan 3. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



SASARAN STRATEGIS PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program		Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.		Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan		
			Tangkap (skala kemandirian)			4. Direktur Perizinan dan Kenelayanan
6	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	6	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	<del>31</del>	Dihitung dari Capaian Nilai Kinerja RB DJPT berdasarkan hasil penilaian mandiri RB atas implementasi RB di DJPT dengan menggunakan	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
			instrumen sesuai ketentuan yang berlaku	
	<p>7 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)</p>	<p><b>73</b></p>	<p>Dihitung dari rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Eselon II lingkup DJPT dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>
	<p>8 Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap</p>	<p><b>10</b></p>	<p>Dihitung dengan mengacu kepada Pedoman dalam</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
	<p>yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)</p>		<p>PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK <math>\geq 75</math></p>	
	<p>9 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan</p>	<p><math>\leq 1</math></p>	<p>Dihitung dari jumlah nilai temuan atas LK TA. 2020 pada LHP kepatuhan dibagi dengan</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
	<p>(LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)</p>		<p>realisasi riil tahun 2020 dan dikali dengan 100%</p>	
	<p>10 Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)</p>	<p><b>85,15</b></p>	<p>Dihitung dari hasil penilaian Itjen KP atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
			<p>(lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku</p>	
	<p>11 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)</p>	<p>3</p>	<p>Dihitung dari survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP dan dilanjutkan dengan kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
	<p>12 Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)</p>	<p>±</p>	<p>Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
	<p>13 Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)</p>	<p><b>84</b></p>	<p>Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup DJPT dilakukan atas: (1) tingkat sharing document mandatory; (2) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf, dan (3) tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>
	<p>14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk</p>	<p><b>65</b></p>	<p>Dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
	<p>perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)</p>		<p>dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT</p>	
	<p>15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)</p>	<p><b>72,5</b></p>	<p>Dihitung dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum pengukuran (T-1)</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>



<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
	<p>16 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)</p>	<p><b>72,5</b></p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)</li> <li>2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).</li> <li>3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).</li> </ol>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
			<p>4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).</p>	
	<p>17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)</p>	<p><b>72,5</b></p>	<p>Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);</li> <li>2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk</li> </ol>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
			<p>pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);</p> <p>3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);</p> <p>4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita</p>	

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
			<p>Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).</p>	
	<p>18 Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)</p>	<p><b>89</b></p>	<p>Dihitung dari penjumlahan 13 (tiga belas) indikator pelaksanaan anggaran, yaitu revisi DIPA, halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPj Bendahara, data kontrak,</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

<p><b>SASARAN STRATEGIS PROGRAM</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan sasaran strategis pada level 1 seharusnya sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM</b> (satuan)</p> <p>Catatan Biro Perencanaan: format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 1 seharusnya indikator kinerja program.</p>	<p><b>TARGET 2021</b></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: <b>dihapus</b> format tabel indikator kinerja utama tidak perlu memasukkan kolom target, sebagaimana format pada Kepmen KP tentang IKU KKP 2021, hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya perubahan apabila dokumen perencanaan kinerja mengalami perubahan target pada tahun berjalan</p>	<p><b>METODE PENGUKURAN</b></p>	<p><b>PENANGGUNG JAWAB</b></p>
			<p>penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, dan konfirmasi capaian output.</p>	
	<p>19 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)</p>	<p><b>86</b></p>	<p>Dihitung dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DJPT kedalam aplikasi SMART Kemenkeu</p>	<p>Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap</p>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN
Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan		Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan			
1	Sumber daya ikan berkelanjutan	1	Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)	85	Dihitung dari jumlah data volume produksi perikanan tangkap baik dari perairan laut maupun perairan darat yang dilakukan validasi dibandingkan dengan data volume produksi perikanan yang diterima dari provinsi
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	2	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	31	Dihitung dari Capaian Nilai Kinerja RB DJPT berdasarkan hasil penilaian mandiri RB atas implementasi RB di DJPT dengan menggunakan instrumen sesuai ketentuan yang berlaku

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA-UTAMA-KEGIATAN</b> (satuan) Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	3 Indeks Profesionalitas ASN <del>Sekretariat</del> Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)  Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	73	Dihitung dari rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai
	4 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	75 100  Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	Dihitung dari jumlah temuan yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah temuan atas LK TA. 2020 pada LHP kepatuhan

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN</b> (satuan)  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	5 Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15	Dihitung dari hasil penilaian Itjen KP atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku
	6 Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)  catatan Biro Perencanaan: tidak ada, terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	85,15	Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: 1. Aspek kepatuhan (30%); 2. Aspek kesesuaian (30%), dan 3. Aspek ketercapaian (40%)
	7 Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	Dihitung dari jumlah dokumen pendukung seluruh komponen Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap
	8 Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)  Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen	84	Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan atas: (1) tingkat sharing document mandatory; (2) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf, dan (3) tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP



<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN</b> (satuan)  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP		
	9 <del>Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</del>  Catatan Biro Perencanaan: terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	65	Dihitung dari Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJPT dibagi dengan Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJPT
	10 Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	1	Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan
	11 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5	Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA-UTAMA-KEGIATAN (satuan)</b>  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
			1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)  2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).  3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).  4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
	12 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5	Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:  1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);  2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA-UTAMA-KEGIATAN (satuan)</b>  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
			3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);  4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);  5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).
	13 Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	89	Dihitung dari penjumlahan 13 (tiga belas) indikator pelaksanaan anggaran, yaitu revisi DIPA, halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPj Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, dan konfirmasi capaian output.

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b> Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	14 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	Dihitung dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DJPT kedalam aplikasi SMART Kemenkeu

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b> Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
1 Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab  Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI  Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran,	1 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)  2 Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	70  100	Dihitung dari membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan Pengelolaan di WPPNRI dibagi dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di WPPNRI.  Dihitung dari menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya dibagi dengan WPPNRI yang

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN</b> (satuan) Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	3 Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100	dikelola Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas.  Dihitung dari WPP yang dilakukan kegiatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan dan/atau jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan/atau penghitungan alokasi sumber daya ikan yang dibagi dengan 11 WPPNRI.
2 Produksi perikanan tangkap perairan darat meningkat  Produksi perairan darat meningkat  Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	4 Persentase jumlah WPP Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	28	Dihitung dari membandingkan jumlah persentase upaya pengelolaan sumber daya ikan perairan darat yang telah dilaksanakan di masing-masing lokasi di dalam WPPNRI Perairan Darat dengan sumber daya ikan yang dikelola di WPPNRI Perairan Darat.

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN
Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan		Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan			
3	<p><del>Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri</del></p> <p>Catatan Biro Perencanaan: tidak ada, terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP</p>	5	<p><del>Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab.Merauke (tingkat kemandirian)</del></p>	4	<p><del>Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner</del></p>
4	Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang baik	6	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	73	Dihitung dari rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	85,15	Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: 1. Aspek kepatuhan

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b> Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
			(30%); 2. Aspek kesesuaian (30%), dan 3. Aspek ketercapaian (40%)
	8 Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat  Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan atas: (1) tingkat sharing document mandatory; (2) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf, dan (3) tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP
	9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	65	Dihitung dari Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat  Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibagi dengan Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
	10 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	72,5	Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b> Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
			1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%); 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN



SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN
Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan		Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan			
1	Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan	1	Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan (lokasi)	28	Dihitung dari jumlah lokasi pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	2	Persentase Operasional Pelabuhan Perikanan yang dibina (Persen)	76,5	Dihitung dari pencapaian pembinaan operasional pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya termasuk pelabuhan perikanan yang menjadi binaan dari pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dibagi dengan jumlah komponen kegiatan yang dilaksanakan
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab.Merauke (tingkat kemandirian)	4	Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner
4	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	4	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	73	Dihitung dari rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b>  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	5 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	85,15	Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: 1. Aspek kepatuhan (30%); 2. Aspek kesesuaian (30%), dan 3. Aspek ketercapaian (40%)
	6 Persentase unit Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dilakukan atas: (1) tingkat sharing document mandatory; (2) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf, dan (3) tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP
	7 <del>Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)</del> yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhan Perikanan	65	Dihitung dari Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat  Kepelabuhanan Perikanan dibagi dengan Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b> Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP		ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
	8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	72,5	Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%); 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN
Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan		Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan			
1	Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing	1	Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)	6.760	Dihitung dari hasil rekapitulasi antara kapal perikanan bantuan yang terbangun dan terstandar serta kapal perikanan yang terdaftar
		2	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)	<del>12.000</del> 750 Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	Dihitung dari hasil rekapitulasi antara alat penangkap ikan bantuan dan API yang telah melalui proses cek fisik dan memperoleh rekomendasi untuk digunakan sesuai PERMEN KP No.71/PERMEN KP/2018 tentang tata kelola alat penangkapan ikan serta sesuai dengan KEPMEN KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Rancang Bangun dan Standarisasi Penamaan API

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA-KEGIATAN (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN
Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan		Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan			
		3	Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen)	100	Dihitung dari persentase jumlah standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan dan kapal perikanan yang dipantau operasionalnya serta dapat dihitung produktivitasnya
2	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing	4	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)	15.000	Dihitung dari jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya, mempunyai sertifikat keterampilan dan keahlian di tiap-tiap provinsi sejak tahun sebelumnya dan tahun berjalan
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian)	4	Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner
4	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	73	Dihitung dari rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA-KEGIATAN (satuan)</b>  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	7 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	85,15	Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: 1. Aspek kepatuhan (30%); 2. Aspek kesesuaian (30%), dan 3. Aspek ketercapaian (40%)
	8 Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	84 83 Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan atas: (1) tingkat sharing document mandatory; (2) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf, dan (3) tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b>  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	9 <del>Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)</del> yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat KAPI  Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	65	Dihitung dari Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dibagi dengan Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	10 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5	Dihitung dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum pengukuran (T-1)
	11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	72,5	Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b>  Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)</b>  Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
			1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);  2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);  3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);  4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN



SASARAN STRATEGIS KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN (satuan)		TARGET 2021	METODE PENGUKURAN
Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan		Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan			
1	Pendapatan Nelayan Meningkat	1	Rata-rata Pendapatan Nelayan (Rp. Juta/nelayan/bulan)	4,22	Dihitung dari jumlah produksi dikurangi dengan biaya operasional nelayan dibagi dengan jumlah periode perhitungan
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)	100	Dihitung dari persentase izin usaha perikanan pusat yang diterbitkan, realisasi kapal izin pusat terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP, serta pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan daerah (SIMKADA) di seluruh Indonesia
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian)	4	Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner
4	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	4	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	73	Dihitung dari rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai
		5	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	85,15	Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dengan menggunakan

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN</b> (satuan) Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
			instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: 1. Aspek kepatuhan (30%); 2. Aspek kesesuaian (30%), dan 3. Aspek ketercapaian (40%)
	6 Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dilakukan atas: (1) tingkat sharing document mandatory; (2) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf, dan (3) tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP
	7 <del>Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)</del> yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan  Catatan Biro Perencanaan terdapat perbedaan antara nomenklatur sasaran, indikator, dan target antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan rancangan KepmenKP	65	Dihitung dari Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dibagi dengan Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN</b> (satuan) Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
	8 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5	Dihitung dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum pengukuran (T-1)
	9 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	72,5	Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%); 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung

<b>SASARAN STRATEGIS KEGIATAN</b> Catatan Biro Perencanaan; Format tabel penamaan sasaran strategis pada level 2 seharusnya sasaran kegiatan	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN</b> (satuan) Catatan Biro Perencanaan: Format tabel penamaan Indikator kinerja utama level 2 seharusnya indikator kinerja kegiatan	<b>TARGET 2021</b>	<b>METODE PENGUKURAN</b>
			Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

No	Pejabat	Paraf
1.	Sesditjen PT	
2.	Dir. PSDI	
3.	Dir. PDK	
4.	Dir. KAPI	
5.	Dir. KP	
6.	Korbid HOK	
7.	Korbid Program	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO